

**PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI
SUMATERA, KALIMANTAN, DAN SULAWESI TAHUN 2015-
2018**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada
program Studi Akuntansi**



**TITI LIBERTY CATUR RAHARJA
1116 29030**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JUNI 2020**

SKRIPSI

PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA, KALIMANTAN, DAN SULAWESI TAHUN 2015-2018

Dipersiapkan dan disusun oleh:

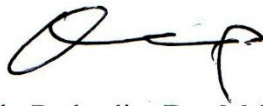
TITI LIBERTY CATUR RAHARJA

No Induk Mahasiswa: 111629030

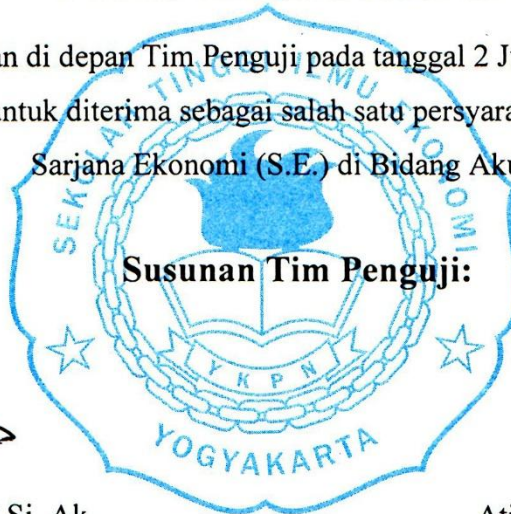
telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 2 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Rudy Badrudin, Dr., M.Si.,Ak.



Penguji



Atika Jauharia Hatta, Dr.,M.Si.,Ak.

Yogyakarta, 2 Juli 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua



Harsono Subyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is a positive influence of village funds and capital expenditure on economic growth in districts on the Province of Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi. Sources of data used are secondary data in the form of detailed reports of village funds, reports on the realization of the Regional Government Budget (APBD), and data on Gross Domestic Regional Product (GDRP) in districts on the Province of Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi period 2015 until 2018 which has been published by Central Bureau of Statistics in Indonesia. The data analysis technique used is quantitative data analysis. The test is conducted in districts on the Province of Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi from 2015 until 2018. From the test result obtained the result that: 1) Village funds has no effect on Economic Growth, 2) Capital expenditure has a negative effect on Economic Growth.

Keywords: *Village Funds, Capital Expenditures, Economic Growth.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari dana desa dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berwujud laporan rincian dana desa, laporan realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD), dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi periode 2015 sampai dengan 2018 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Sampel penelitian yang diuji berasal dari kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi periode 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil pengujian tersebut memperoleh hasil bahwa: 1) Dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Dana Desa, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terkait dengan upaya tersebut Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah yang mana segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dengan asas otonomi dan untuk kepentingan rakyat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengesahkan UU Desa No 6 Tahun 2014.

Desa merupakan tingkatan paling kecil di mana suatu otonomi daerah diterapkan dan desa diartikan sebagai ujung tombak pembangunan regional dan nasional. Sehingga untuk mencapai pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pembangunan di Indonesia harus dimulai dari wilayah desa. Alasannya karena sebagian masyarakat tinggal di desa dan hampir beberapa masalah mendasar di negara ini ada di desa, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, kesehatan yang buruk, serta fasilitas sarana prasarana yang tidak memadai. Jika beberapa masalah tersebut bisa teratasi di desa atau bisa dikatakan wilayah desa sudah maju, negara juga akan mengalami hal yang sama. Untuk mengelolanya, desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu dana desa.

Dengan diberikannya dana desa diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi karena dana tersebut akan digunakan untuk biaya modal pembangunan bagi pemerintah dengan cara peningkatan layanan publik, mempromosikan desa, mengatasi kesenjangan desa dan memperkuat rakyat sebagai subyek pembangunan. Alokasi dana desa Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dari tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikhawatirkan berpotensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana. Salah satu penyebabnya peraturan pemerintah yang dikeluarkan belum secara mendalam disosialisasikan dan tidak adanya pengawasan atas penggunaan dana tersebut.

Selain dana desa, pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan cara memberikan alokasi dana dalam rupa belanja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

modal yang diberikan pada setiap wilayah. Belanja modal dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Belanja modal tersebut menghasilkan pembangunan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, rumah sakit dan gedung sekolah serta berbagai fasilitas umum lainnya yang memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat (Badrudin, 2017). Tetapi pengelolaan belanja modal oleh pemerintah masih kurang produktif dan belum bisa mengimbangi jenis belanja lain. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kualitas layanan publik.

Dana desa dan belanja modal berasal dari sumber pendanaan yang berbeda tetapi keduanya berkemungkinan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pengelolaannya agar menunjang pertumbuhan ekonomi.

II. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan

Teori yang menghubungkan antara pihak pertama (*principal*) yang berperan sebagai pemilik dari sumber daya, yang kemudian memercayakan kepemilikan sumber daya yang dimiliki kepada pihak lain (*agent*) untuk mencapai tujuan *principal* disebut Teori Keagenan (*Agency Theory*). Menurut (Jensen & Meckling, 1976) munculnya teori keagenan karena adanya kesepakatan bersama antara *agent* dan *principal*.

Interaksi antara *agent* dan *principal* awalnya ketika *agent* memberikan pendapat dan berakhir pada *principal* menerima atau menolak pendapat tersebut. Teori keagenan bermaksud memecahkan konflik antara kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi antara *agent* dan *principal* disebut dengan *agency problems*. Penyebabnya adalah dikarenakan terjadi asimetri informasi. Apabila dikaitkan dengan ini, pengelola dana desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pengelola dana desa (*agent*) tidak menjalankan sesuai ketentuan yang berujung pada terjadinya penyelewengan dana. Hal ini sering terjadi karena *agent* cenderung mementingkan tujuan pribadi dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kelompoknya serta menghindari risiko daripada memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (*principal*).

Teori Desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan runtut dari proses pendistribusian anggaran yang berawal dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam tujuan sebagai unsur pendukung fungsi ataupun prosedur yang sudah diberikan pemerintah berkaitan dengan layanan dan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan (Saragih, 2014).

Menurut Mardiasmo dalam (Mudhofar & Tahar, 2016), tujuan desentralisasi fiskal yakni 1) mengurangi ketimpangan fiskal antarpemerintah (baik pusat maupun daerah) dan antardaerah; 2) tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik dan juga untuk mengurangi tingkat kesenjangan; 3) Melakukan pemanfaatan sumber daya nasional dengan cara prosedur seefisien mungkin; 4) melakukan pelaksanaan secara efisien, *on time*, dan juga adil dalam menjalankan transparansi, tata kelola dan akuntabel, dan 5) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal, asas *money should follow function* harus dicermati, yang diartikan pada saat melakukan penyerahan atas wewenang yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak terhadap anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan. Semakin banyak wewenang dilimpahkan, semakin besar kapasitas dana yang diperlukan. Maka dari itu, prinsip efisiensi merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan desentralisasi, sehingga pemerintah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang *good governance*. Untuk menilai pelaksanaan pemerintah yang *good governance*, pemerintah harus memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif (Saragih, 2014).

Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembangunan ekonomi merupakan terjadinya perubahan di dalam struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan yang terjadi sebagai sebuah proses transformasi, di mana dengan seiringnya waktu ditandai dengan adanya perubahan dasar dalam prosedur kegiatan ekonomi secara operasional dan juga dalam struktural masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah runtut peristiwa yang dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan produksi barang ataupun jasa dalam ekonomi masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sama-sama dalam bentuk suatu proses. Bedanya, pembangunan ekonomi melibatkan perubahan struktur ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak.

Menurut Adam Smith terdapat aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk dan *output* total. Item pokok yang disampaikan Smith yaitu suatu hal yang berkaitan dengan ketersediaan faktor produksi khususnya tanah, barang modal, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia itu.

Teori selanjutnya yaitu Teori David Ricardo yang ditandai dengan: 1) Tanah terbatas jumlahnya sehingga sebagai faktor penyekat dalam proses ekonomi, 2) peningkatan tenaga kerja sesuai dengan tingkat upah, 3) Pembagian keuntungan hanya terjadi pada saat keuntungan yang didapatkan lebih besar dari keuntungan minimal yang didapat, 4) teknologi selalu berubah dan berkembang, 5) dominannya sektor pertanian.

Selanjutnya, teori Harrod-Domar bertujuan melengkapi beberapa masalah ekonomi yang belum dibahas di teori pengembangannya yaitu menjelaskan proses jangka panjang dan menghubungkan antara tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar menganalisa kriteria yang digunakan agar perekonomian bisa berkembang dan tumbuh dalam jangka panjang.

Teori Solow-Swan yang merupakan teori Neo-Klasik mengembangkan teori Harrod-Domar dengan menambahkan faktor yang mendasar berkaitan dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi yaitu, tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Teori selanjutnya, teori Nicholas Kaldor di mana langkah-langkah dalam penjelasan terkait teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kaldor disebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan *stylized facts*. Ada dua sisi pendekatan melalui *stylized facts*. Pertama, menghubungkan adanya disparitas antara Neo-Keynes dan Neo-Klasik. Sisi kedua, yaitu berkembangnya pemikiran Kaldor terhadap pertumbuhan ekonomi semakin mengarah menuju pemikiran yang memuat masalah-masalah pembangunan ekonomi.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan desa dikelola berdasar asas-asas: 1) transparan, prinsip keterbukaan akan informasi, 2) akuntabel, yaitu kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan, 3) partisipatif, yaitu mengikutsertakan lembaga desa dan masyarakat, 4) tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan harus mengacu aturan.

Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Belanja modal tersebut menghasilkan pembangunan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, rumah sakit dan gedung sekolah serta berbagai fasilitas umum lainnya yang memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat (Badrudin, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat terutama dalam kegiatan produksi untuk meningkatkan hasil produksi barang dan jasa agar meningkatnya kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan menyediakan banyak jenis barang ekonomi yang terus mengalami kenaikan yang dilakukan negara untuk rakyatnya. (Kusuma Putra & Nur Pratiwi, 2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu runtut proses di mana terjadi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertambahan *output* perkapita dalam periode waktu tertentu. (Badrudin, 2017) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses dalam usaha meningkatkan *output* perkapita dalam jangka panjang.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana desa adalah sumber dana dari pemerintah pusat, yang diserahkan kepada desa guna membangun desa. Semakin besar dana desa diberikan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. (Prasetyanto, 2012) membuktikan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan kinerja fiskal yang dimiliki daerah juga meningkatkan perekonomian daerah, di samping itu juga dapat menurunkan jumlah penduduk kurang mampu. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Afrilianto, 2017) dan (Rimawan & Aryani, 2019) yang membuktikan adanya pengaruh positif alokasi dana desa pada pertumbuhan ekonomi. Sementara (Handayani & Badrudin, 2019) membuktikan bahwa alokasi dana desa belum berdampak secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Mengenai penelitian tersebut dapat dijelaskan jika dana desa dikelola dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka pembangunan desa akan terwujud. Perkembangan ini akan meningkatkan ekonomi di masyarakat.

H₁: Dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal digunakan pemerintah sebagai penyediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana sebagai salah satu bentuk pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di desa. Pada saat pemerintah membuat kebijakan untuk menetapkan anggaran belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rutin, langkah tersebut sudah tepat untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Telah dilakukan beberapa penelitian oleh (Waryanto, 2017) dengan hasil bahwa hubungan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan. (Nurmainah, 2013) juga membuktikan hal serupa adanya pengaruh signifikan tersebut dengan variabel sama. Lain hal dengan (Arini S, 2016) yang membuktikan bahwa hubungan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan. Tetapi menurut (Hakim, 2013) menyatakan bahwa tidak seluruh belanja modal mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₂: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018.

III. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan yaitu seluruh kabupaten di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang menyediakan data mengenai dana desa, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2018.

Data Penelitian

Data yang digunakan peneliti yaitu jenis data deskriptif meliputi data jumlah belanja modal, data jumlah alokasi dana desa tiap kabupaten, dan data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tahun 2015 sampai dengan 2018. Sumber data menggunakan data sekunder yang peneliti peroleh dan akses melalui *website djpk.Kemenkeu.go.id* untuk dana desa dan belanja modal, serta data pertumbuhan ekonomi melalui situs *bps.go.id*.

Variabel Independen

Dana Desa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengukuran besarnya dana desa setiap kabupaten/kota dinyatakan dengan nominal mata uang Rupiah (Rp) dengan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula

Belanja Modal

Besarnya belanja modal dinyatakan dengan nominal mata uang Rupiah (Rp) dengan perhitungan sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Variabel Dependen

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk persen (%) dengan perhitungan:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

keterangan:

$PDRB_t$: PDRB tahun terkait

$PDRB_{t-1}$: PDRB tahun sebelum tahun terkait

IV. Analisis Data dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Data	Minimum	Maksimum	Rata – Rata	Standar Deviasi
DD	948	8,728,910,000	635,314,441,000	96,886,912,844	74,694,662,299

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BM	948	35,427,070,357	2,820,501,94 2,494	281,818,795,4 37	162,072,078, 111
PE	948	-11.69	67.82	5.2804	3.17509

Berdasar tabel 1 variabel dana desa (DD) kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi memiliki nilai minimum sebesar Rp8.728.910.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp635.314.441.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 dengan nilai rata-rata sebesar Rp96.886.912.844 dan standar deviasi sebesar Rp74.694.662.299. Variabel belanja modal (BM) kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi menghasilkan nilai minimum sebesar Rp35.427.070.357 yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Selatan tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp2.820.501.942.494 yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dengan nilai rata-rata sebesar Rp281.818.795.437 dan standar deviasi sebesar Rp162.072.078.111.

Nilai minimum pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yaitu sebesar -11,69% yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2015. Angka minus ini disebabkan karena dampak tsunami yang terjadi di Aceh menyebabkan perekonomian turun drastis. Lalu untuk nilai maksimum diangka 67,82% yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali tahun 2015 dengan nilai rata-rata sebesar 5,2804% serta standar deviasi sebesar 3,17509%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0.143
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0.753

Diketahui nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,753 > 0,05, artinya data berdistribusi normal. Sehingga data penelitian memenuhi syarat uji normalitas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
DD	0,988	1,012	Bebas Multikolinearitas
BM	0,988	1,012	Bebas Multikolinearitas

Seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* yang sama yaitu sebesar 0,988 dan nilai yang sama pula untuk VIF sebesar 1,012. Karena hasil uji menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat ditarik kesimpulan bahwa antar variabel independen bebas multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
DD	1,000	Bebas heteroskedastisitas
BM	1,000	Bebas heteroskedastisitas

Nilai signifikansi variabel dana desa (DD) dan belanja modal (BM) masing-masing memperoleh nilai sebesar 1,000. Kedua hasil nilai signifikansi pada seluruh variabel independen tersebut melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat atau bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

N	DW	dL	dU	4-dL	4-dU
948	1,907	1,89127	1,89548	2,10873	2,10452
Hasil	Bebas Autokorelasi				

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* (*dw*) sebesar 1,907 dengan jumlah variabel independen (k) = 2 dan sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak = 948 dengan demikian diperoleh nilai $dL = 1,89127$, nilai $dU = 1,89548$, nilai $4-dL = 2,10873$, dan nilai $4-dU = 2,10452$ yang berarti nilai $dU < dW < 4-dU$ atau $1,89127 < 1,907 < 2,10452$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Regresi Berganda

Variabel	Coefficient	Standard Error
<i>Intercept</i>	3.227336	0.459486
DD	0.017270	0.021993
BM	-0.238571	0.038527

Persamaan regresi berganda berdasar tabel 4.6 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PE = 3,227336 + 0,017270DD - 0,238571BM + \varepsilon$$

Nilai *intercept* pada tabel memiliki arti yaitu jika variabel independen baik dana desa (DD) maupun belanja modal (BM) bernilai 0 dengan kata lain tidak terdapat peningkatan maupun penurunan, maka pertumbuhan ekonomi (PE) bernilai 3,227336. Nilai *coefficient* pada dana desa (DD) bernilai 0,017270 bertanda positif menjelaskan bahwa apabila dana desa (DD) terjadi peningkatan sebesar 1%, maka diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,017270, sedangkan nilai *coefficient* pada belanja modal (BM) bernilai -0,238571 bertanda negatif menjelaskan bahwa apabila belanja modal (BM) terjadi peningkatan sebesar 1%, maka diikuti penurunan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,238571.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Multiple R</i>	0,22577
-------------------	---------

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<i>R Square</i>	0,05097
<i>Adjusted R Square</i>	0,04897
<i>Standard Error</i>	3,09638
Jumlah data	948

Koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,05097. Dengan demikian, pengaruh dari variabel independen (DD dan BM) terhadap dependennya (PE) sebesar 5,097% di mana sisanya 94,903% dipengaruhi variabel lain selain variabel yang digunakan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji T)

No	Hipotesis	Koef. Regresi	t hitung	Prob. Sig.	Prediksi	Temuan
1	Dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tahun 2015-2018	0,017270	0,785	0,433	Positif	Tidak Terdukung
2	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tahun 2015-2018	-0,238571	-6,193	0,000	Positif	Tidak Terdukung

Hipotesis satu yang dikemukakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

satu memperoleh hasil bahwa dana desa (DD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,017270 bertanda positif dan nilai t hitung sebesar 0,785 tidak melebihi nilai t tabel yaitu 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,433 melebihi 0,05, maka hipotesis satu ditolak, artinya dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, hipotesis dua yang dikemukakan penelitian ini bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis dua memperoleh hasil bahwa belanja modal (BM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,238571 bertanda negatif, nilai t hitung sebesar -6,193 tidak melebihi nilai t tabel yaitu 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 tidak melebihi 0,05. Berdasar hasil yang diperoleh, maka hipotesis dua ditolak, artinya belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hasil tersebut didukung melalui pengujian hipotesis di mana nilai koefisien regresi sebesar 0,017270 bertanda positif dan nilai t hitung sebesar 0,785 tidak melebihi nilai t tabel yaitu 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,433 melebihi 0,05, maka hipotesis satu ditolak. Dapat dikatakan bahwa pengadaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena adanya potensi terjadinya penyimpangan berupa penyelewengan atau korupsi dana.

Hasil ini didukung oleh penelitian Handayani & Badrudin (2019), namun tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rimawan & Aryani (2019), Atmojo *et al.*, (2017), Afrilianto (2017) yang berkesimpulan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang telah dilakukan penulis memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap belanja modal kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada pengujian hipotesis di mana nilai koefisien regresi sebesar $-0,238571$ bertanda negatif, nilai t hitung sebesar $-6,193$ tidak melebihi nilai t tabel yaitu $1,645$ serta nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,000$ tidak melebihi $0,05$, maka hipotesis dua ditolak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah kurang produktif, atau bisa juga dikarenakan hasil alokasi belum terealisasi dalam jangka waktu pendek atau pembangunan infrastruktur masih tahap proses sehingga belum memperoleh hasil terhadap belanja modal tersebut.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan (Arini S, 2016), namun hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurmainah (2013), Astria (2014) dan Waryanto (2017) yang menyatakan adanya pengaruh positif dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta pada penelitian Hakim (2013) menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali pada variabel belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal tanah, irigasi, dan jaringan tidak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi karena belanja tersebut memerlukan pembangunan sehingga harus menunggu sampai aset tersebut selesai dan dapat digunakan.

V. Kesimpulan

1. Dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengadaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena adanya potensi terjadinya penyimpangan berupa penyelewengan atau korupsi dana.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tahun 2015-2018. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kurang produktifnya dalam pengelolaan dana belanja modal atau bisa juga karena hasil alokasi belum terealisasi dalam jangka waktu pendek atau pembangunan infrastruktur masih tahap proses sehingga belum memperoleh hasil terhadap belanja modal tersebut.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan data selama 4 tahun, alangkah baiknya jika menguji pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibutuhkan waktu yang lebih lama agar mendapat hasil yang lebih kompleks.
2. Hasil penelitian tidak dapat diimplementasikan untuk seluruh provinsi yang berada di Indonesia, dikarenakan dalam penelitian ini hanya dapat diimplementasikan untuk mencakup kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi saja.

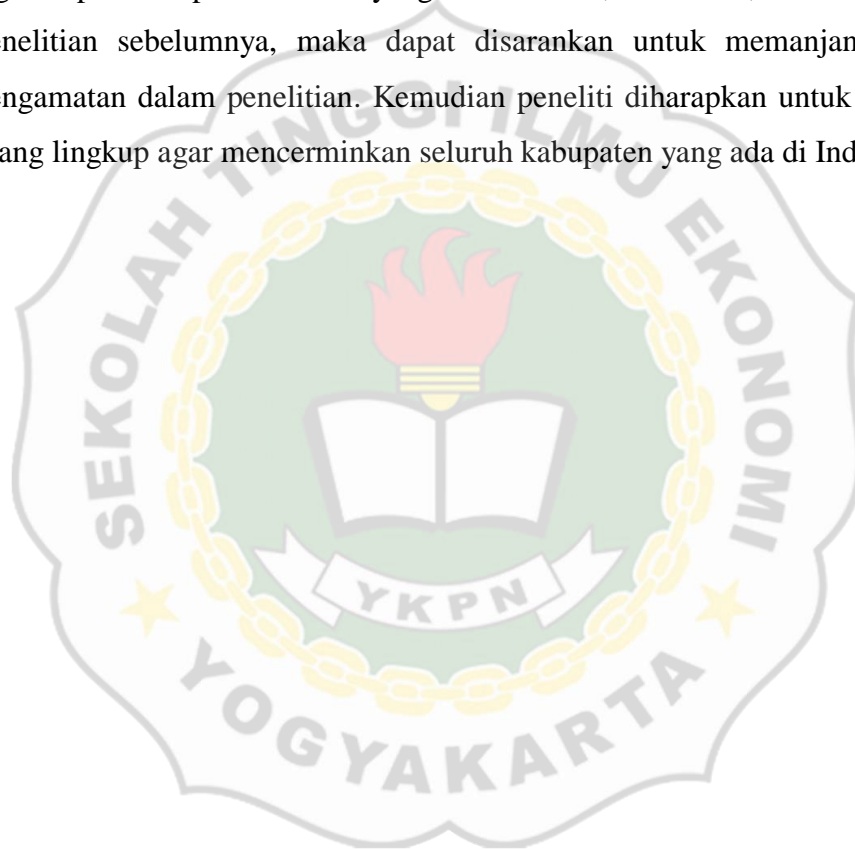
Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan dapat mengelola dana desa dan belanja modal dengan baik dan memberikan pengawasan atas penggunaannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Semakin baik pengelolaan dan pengawasan tersebut maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang digunakan seperti *social welfare* dengan menggunakan Indeks Gini tiap kabupaten untuk menggambarkan bahwa dana desa telah dialokasikan secara efektif dan mengetahui ada tidaknya ketimpangan. Investasi swasta juga bisa ditambahkan guna memperdalam kajian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

analisis. Hal ini berdasar pada belanja modal kabupaten di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena tidak produktifnya belanja modal serta hasilnya belum bisa dirasakan dalam jangka waktu pendek.

Dalam pengambilan data disarankan untuk memastikan kelengkapan data. Agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat, bervariasi, dan lebih baik dari penelitian sebelumnya, maka dapat disarankan untuk memanjangkan waktu pengamatan dalam penelitian. Kemudian peneliti diharapkan untuk memperluas ruang lingkup agar mencerminkan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilianto, A. G. (2017). *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bogor*.
- Arini S, P. R. (2016). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan*. 2(2).
<https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284>
- Astria, S. (2014). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1). <https://doi.org/10.29259/jep.v12i1.4867>
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi EKonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARIST Sosial Politik Humaniora*, 5(1).
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (2 ed). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Desa, U. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hakim, L. (2013). PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). *Jesp*.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3).
<https://doi.org/10.18196/jai.2003129>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kusuma Putra, C., & Nur Pratiwi, R. (2013). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2).
- Prasetyanto, E. (2012). *Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Di Indonesia*. 1–207.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3).
- Saragih, J. P. (2014). *Politik Desentralisasi Fiskal Permasalahan Dalam Implementasi*. 5(2).
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>